



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)
UNIT KERJA : KEDEPUTIAN BIDANG SARANA DAN PRASARANA, DAN SISTEM
KOMUNIKASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUPARMONO
2. Jabatan : DEPUTI
3. NHK : 744941

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp.

6.346.700.000

1. Tanah Seluas 1035 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
2. Tanah Seluas 1203 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 267.200.000
3. Tanah Seluas 429 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 85.800.000
4. Bangunan Seluas 52.4 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 880.000.000
5. Tanah Seluas 1100 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 242.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 1600 m2/249 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 2.750.000.000
7. Tanah Seluas 801 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 616.700.000
8. Bangunan Seluas 26.45 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 495.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/38 m2 di SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 605.000.000
10. Tanah Seluas 1110 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

412.750.000



| | | |
|---|------------|-----------------------|
| 1. MOTOR, HONDA NF 100 Tahun 2007, HASIL SENDIRI | Rp. | |
| 500.000 | | |
| 2. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2011, HASIL SENDIRI | Rp. | |
| 74.250.000 | | |
| 3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2014, HASIL SENDIRI | Rp. | |
| 200.000.000 | | |
| 4. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2016, HASIL SENDIRI | Rp. | |
| 138.000.000 | | |
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | 20.700.000 |
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | ---- |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 3.664.573.758 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | ---- |
| Sub Total | Rp. | 10.444.723.758 |
| III. HUTANG | Rp. | ---- |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 10.444.723.758 |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.